

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wilayah

Wilayah adalah ruang. Mengenai ruang ini ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan subjektif menyatakan penentuan wilayah sebagai cara membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang. Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk menerangkan ruang yang didefinisikan menurut kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, apabila kriteria berubah maka batas wilayahnya pun berubah (Nurzaman, 2012).

Istilah Wilayah, Kawasan atau daerah sering dipertukarkan penggunaannya dalam beberapa literatur, namun berbeda dalam cakupan ruang, dimana wilayah digunakan untuk pengertian ruang secara umum, sedangkan istilah daera” digunakan untuk ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan (Tarigan, 2005). Selanjutnya dikatakan bahwa wilayah sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya, sedangkan daerah dapat didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai batas secara jelas berdasarkan yuridiksi administratif.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang mempunyai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau fungsional. Kemudian menurut Rustiadi *et al* (2007),

wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen didalamnya (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional).

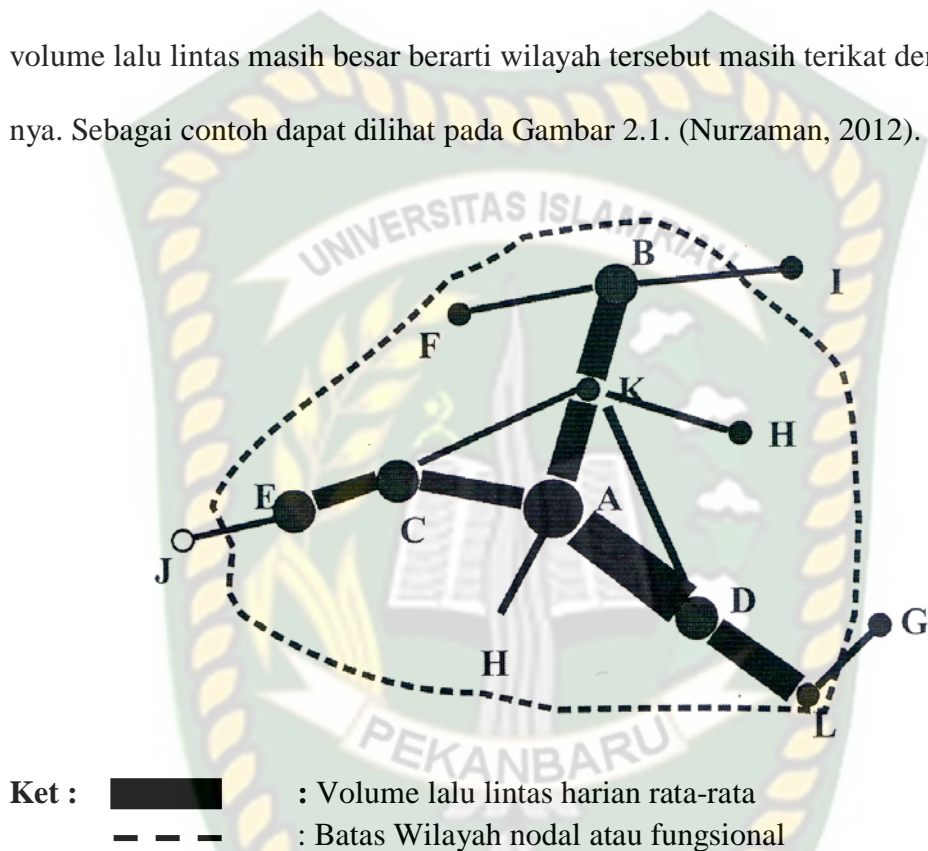
2.1.1 Wilayah Menurut Pandangan Subjektif

Konsep yang memandang wilayah sebagai cara untuk mengklarifikasi berkembang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Ketika ekonomi masih berupa sistem pertanian yang sederhana, wilayah dipandang sebagai “wilayah formal” yang didefinisikan berdasarkan homogenitas. Fase selanjutnya melihat wilayah sebagai “wilayah fungsional” dengan perhatian pada interdependensi. Interaksi antara bagian-bagian wilayah didefinisikan berdasarkan hubungan fungsional.

Suatu wilayah formal adalah suatu wilayah yang berbentuk berdasarkan kriteria homogenitas. Pada awalnya homogenitas ini berdasarkan kriteria fisik dan berkaitan dengan konsep geografi, misalnya topologi, iklim, dan vegetasi. Kemudian homogenitas ini bergeser ke kriteria ekonomi, misalnya wilayah yang homogen dilihat dari aktivitas pertaniannya ataupun aktivitas industrinya. Suatu “wilayah fungsional” adalah suatu wilayah yang didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu serta memperlihatkan suatu hubungan fungsional ataupun interdependensi antara bagian-bagiannya. Karena interdependensi ini biasanya terikat oleh suatu *node* (pusat), seringkali wilayah ini disebut sebagai wilayah nodal atau wilayah terpolarisasi yang terdiri atas unit-unit yang heterogen, seperti kota besar, kota kecil, dan permukiman. Semua unit ini terikat oleh suatu *node*. Ikatan ini dapat digambarkan dalam aliran berdasarkan kriteria sosio-ekonomi. Misalnya saja

aliran barang antara *node* dengan kota-kota sekitarnya akan penglaju (*commuters*) dan sebagainya.

Menurut batas wilayah (deleniasi wilayah) fungsional atau wilayah nodal ini dapat dilakukan, misalnya dengan melihat besarnya volume lalu lintas. Apabila volume lalu lintas masih besar berarti wilayah tersebut masih terikat dengan *node*-nya. Sebagai contoh dapat dilihat pada Gambar 2.1. (Nurzaman, 2012).



Sumber : Nurzaman, 2012

Gambar 2.1. Wilayah Fungsional

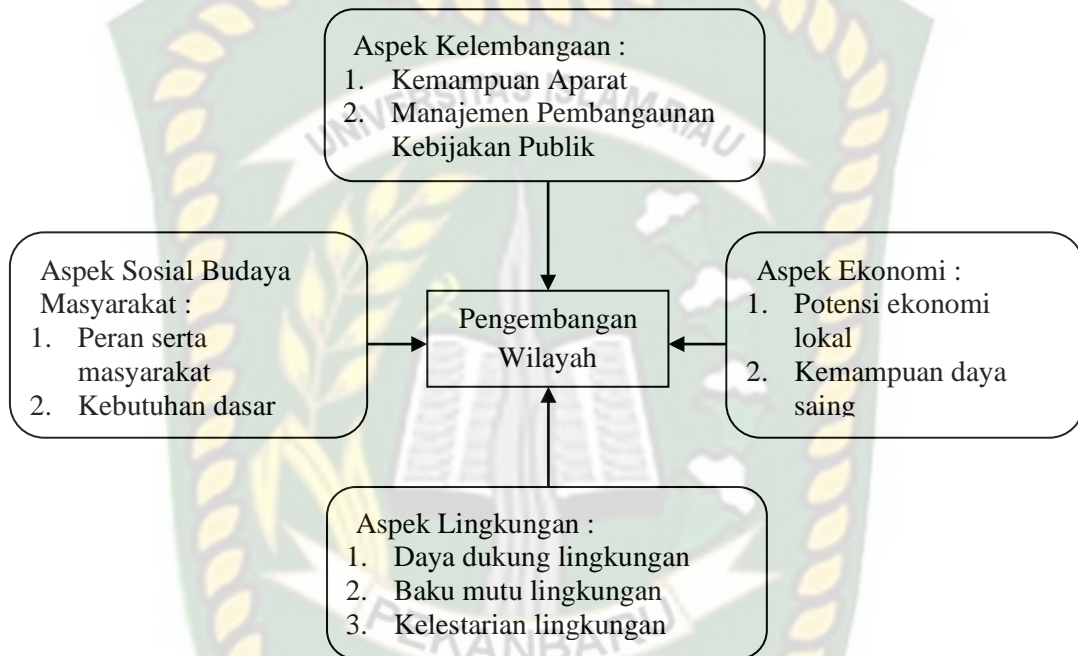
Kota B, C, D, dan K jelas termasuk kedalam wilayah fungsional yang terpusat di A. Demikian juga kota E dan I walaupun ikatannya sudah lebih lemah. Kota G, I, dan J sudah tidak dapat dimasukan lagi kedalam wilayah fungsional karena interaksinya sudah sangat lemah. Kota F dan H, walaupun interaksinya lemah, masih dapat masuk kedalam wilayah ini karena letak geografisnya.

Analisis mengenai wilayah formal dan fungsional di atas menunjukkan bahwa penentuan wilayahs secara subjektif sukanlah tujuan akhir. Penentuan wilayah hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Seperti penentuan wilayah persawahan Pantura, pada waktu menentukan delineasi wilayah, pasti telah ditentukan tujuan dibentuknya wilayah tersebut. Apakah untuk meningkatkan produktivitas sawah atau untuk mencegah tanah pesawaha beralih fungsi menjadi kawasan industri atau perkotaan, atau tujuan lainnya. Tiap tujuan tersebut akan memberikan delineasi wilayah yang berbeda. Demikian juga pada saat menentukan wilayah fungsional. Dengan demikian, wilayah formal dan wilayah fungsional dapat menjadi kerangka penentuan klasifikasi ketiga dari wilayah subjektif, yaitu wilayah perencanaan dan pengembangan (*planning region*). Wilayah pengembangan atau disebut juga sebagai wilayah pemograman (*iprogramming region*) sebagai suatu wilayah yang memperlihatkan keterkaitan atau kesatuan atas keputusan-keputusan ekonomi. Keeble memberi batas dari wilayah perencanaan dan pengembangan ini, wilayah pengembangan harus cukup luas sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam distribusi penduduk dna lapangan kerja, tetapi cukup kecil sehingga persoalan pengembangan dapat dilihat sebagai satu kesatuan (Nurzaman 2012).

2.1.2. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan

yang terpadu. Pendekatan pengembangan wilayah selalu mempertimbangkan aspek keruangan (spasial), sebab setiap ruang mempunyai karakteristik tertentu, yang memerlukan perlakuan berbeda (Santoso, 2006 dalam Putra, 2010). Oleh karena itu, analisis pengembangan wilayah memerlukan adanya komponen pengembangan wilayah seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 berikut ini.



Sumber : Santoso (2006) dalam Putra (2010)

Gambar 2.2. Komponen Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kompoen-komponen pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat ada beberapa aspek-aspek yang perlu dikaji diantaranya yaitu : aspek kelembagaan, aspek sosial budaya masyarakat, aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Dilihat dari aspek ekonomi ada dua hal yang perlu dikaji yaitu potensi ekonomi lokal dan kemampuan daya saing dari sektor unggulan tersebut. Adanya kesadaran bahwa kegiatan ekonomi tidak didistribusikan pada suatu ruang yang homogen, sehingga kegiatan yang bertujuan ekonomi dan sosial merupakan kegiatan yang tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang

mendukungnya. Hal yang sama juga terjadi terkait kesejahteraan penduduk yang terkait erat dengan aksesibilitas terhadap suatu lokasi, dimana kegiatan ekonomi terikat. Pendekatan melalui pengembangan wilayah memiliki keuntungan yang diantaranya adalah pertama, adanya pengenalan terhadap wilayah, terutama terkait kondisi sosial masyarakatnya dan juga terhadap potensi unik yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini akan sangat memudahkan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu wilayah. Pendekatan diharapkan akan memperkecil adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kedua, pengembangan wilayah merupakan perangkat yang melengkapi kebijaksanaan pembangunan nasional. Sehingga prinsip dan tujuan pengembangan wilayah tidak terlepas juga dari tujuan dan prinsip pembangunan nasional secara umum (Alkadri, 2002).

2.1.3. Tujuan Pengembangan Wilayah

Tujuan pengembangan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyata, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisien dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat pengembangan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemkan sebagai berikut (Sjafrizal, 2012).

1. Didalam pengembangan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan diwilayah

tersebut dimasa yang akan datang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga.

2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan yang diizinkan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penempatan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antarsektor, pengoptimalan investasi, terciptanya efisiensi dalam kehidupan, dan menjamin kelestarian lingkungan.

Pengembangan wilayah harus sesuai dengan rencana dan menjadi tepat sasaran secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada. Masalah yang rumit adalah bahwa pada lokasi yang direncanakan seringkali telah terisi dengan kegiatan lain. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantinya dengan kegiatan baru, atau apa yang direncanakan harus sesuai dengan apa yang telah ada dilapangan (Tarigan, 2005).

2.1.4. Konsep Pengembangan Wilayah

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) dalam tata cara perencanaan pengembangan kawasan untuk percepatan daerah, pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang diterapkan antara lain :

A. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya

Adapun konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya
- 2) Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan
- 3) Pengembangan wilayah berbasis efisiensi
- 4) Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan

B. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang

Adapun konsep pengembangan wilayah berbasis tata ruang yang membagi wilayah kedalam:

- 1) Pusat pertumbuhan
- 2) Integrasi fungsional
- 3) Desentralisasi
- 4) Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah – daerah tertinggal.

5) Konsep pengembangan wilayah berdasarkan *cluster*. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya – upaya inovasi pengembangannya. Untuk mengembangkan *cluster*, perlu dilakukan beberpa tindakan antara lain:

- a) Memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan
- b) Menjalin kerjasama
- c) Mengelola dan meningkatkan pelayanan
- d) Mengembangkan tenaga ahli
- e) Mendorong inovasi dan kewirausahaan
- f) Mengembangkan pemasaran dan member label khas bagi kawasan

Sedangkan dalam konsepnya,

- a) Berbasis pada sektor unggulan
- b) Dilakukan atas dasar karakteristik daerah.
- c) Dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
- d) Mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan kebelakang.
- e) Dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip otonomi dan desentralisasi.

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah :

a. Sebagai *growth center*

Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spred effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

b. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.

c. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

d. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan. Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya.

2.2. Konsep Pengembangan Dari Atas.

Konsep pengembangan dari atas merupakan teori yang perkembangan bagi suatu *banal space*, yaitu ruang yang abstrak, yang menjelaskan atau mendefinisikan suatu objek berdasarkan relasinya. Objek disini lebih bertujuan kepada suatu kegiatan ekonomi wilayah, dan lebih menekankan pada perkembangan ekonomi yang dinamis dipacu oleh inovasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konsep pengembangan dari atas memberikan implikasi bahwa strategi perkembangan haruslah dilakukan dengan berkonsentrasi pada beberapa sektor terpilih saja untuk kemudian diharapkan dapat merambat ke sektor lainnya.

Konsep kutub pertumbuhan menyimpulkan bahwa konsep ini, sampai saat ini, merupakan konsep yang mempunyai landasan teori yang paling kuat. Dilandasi oleh pemikiran Schumpeler mengenai peran inovasi dalam perkembangan, Perroux mengembangkan teorinya mengenai kutub pertumbuhan dengan industri propulsifnya. Pemikiran perroux ini kemudian diperkaya oleh pemikiran teori ketidakseimbangan dari Hirschman yang dijiwai teori neoklasik, serta Myrdal yang tidak sepenuhnya percaya pada kekuatan penyeimbang secara otomatis. Peran unsur ruang kemudian diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Boudeville dan kawan-kawan serta Berry, dengan adanya unsur ruang serta unsur prespektif ini menjadikan teori penjalaran dari Perroux berkembang menjadi suatu konsep pengembangan wilayah yang lengkap dengan unsur ruang serta unsur sektor pengembangan wilayah. Hal ini menjadikan konsep ini sebagai konsep yang berperan dalam perencanaan ruang serta perencanaan pengembangan ekonomi wilayah (Nurzaman, 2012).

2.3. Pengembangan dan Perencanaan Ekonomi

Pada dasarnya banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai perbedaan didalam perencanaan, perbedaan tersebut tentu perbedaan didalam perencana yaitu baik perencanaan pengembagan fisik dengan perencanaan pengembangan ekonomi. Perencanaan fisik adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah, misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas untuk umum dan lain-lain.

Pengembangan perencanaan ekonomi (*economi planning*) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Pengembangan ekonomi lebih didasarkan atas mekanisme pasa ketimbang perencanaan fisik yang lebih didasarkan atas kelayakan teknis. Perlu diahami apabila perencanaan pengembangan itu bersifat terpadu, perencanaan fisik berfungsi untuk mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan didalam perencanaan ekonomi (Sjafrizal, 2012).

2.4. Konsentrasi Ekonomi wilayah

Konsentrasi ekonomi wilayah menunjukkan *share* suatu wilayah dan distribusi lokasi dari suatu industri. Apabila suatu distribusi suatu industri tidak merata, dan ada wilayah yang mendominasi berlokasinya industri, maka menunjukkan bahwa industri terkonsentrasi secara spasial diwilayah tersebut. Konsentrasi ekenomi wilayah secara spasial menunjukkan bahwa industri tidak

berlokasi secara merata pada seluruh wilayah, akan tetapi mengelompok secara berdekatan pada bagian tertentu pada wilayah tertentu (Kuncoro, 2002).

Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses yang selektif dan hanya terjadi pada kasus tertentu bila dipandang dari segi geografis. Sebagai contoh : Amerika Serikat, mayoritas industri manufaktur telah sekian lama terkonsentrasi pada suatu lokasi yang disebut sabuk manufaktur. Konsentrasi ekonomi spasial yang merupakan serupa juga ditemukan dikawasan industri *Axial belt* di Inggris (Kuncoro, 2002).

Defenisi yang dikemukakan sebelumnya melengkapi pandangan Krugman, (2003) yang menyatakan bahwa konsentrasi ekonomi wilayah merupakan aspek yang ditekankan dari aktivitas ekonomi secara geografis dan sangat penting dalam penentuan lokasi industri, Krugman menyatakan bahwa dalam konsentrasi aktivitas ekonomi secara wilayah, ada tiga hal yang terkait yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. Perusahaan-perusahaan cenderung berkonsentrasi secara spasial dan melayani seluruh pasar dan suatu lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dan meningkatkan kekuatan skala ekonomi. Perusahaan-perusahaan cenderung berlokasi pada wilayah yang memiliki permintaan lokal yang besar untuk meminimalisasi biaya transportasi, akan tetapi permintaan lokal yang besar cenderung berlokasi disekitar terkonsentrasinya aktivitas ekonomi.

Keuntungan atau penghematan yang diperoleh dari perusahaan – perusahaan yang berkumpul pada lokasi yang terkonsentrasi dapat dikategorikan sebagai berikut (Capello, 2007).

- a. Keuntungan internal untuk perusahaan, juga disebut *economies of scale*. Keuntungan ini disebabkan adanya proses produksi dalam skala besar sehingga berdampak menurunkan biaya per unit output (menurunkan *average cost*). Untuk mendapatkan keuntungan dari produksi skala besar, perusahaan berkonsentrasi pada semua pabrik disuatu lokasi yang sama. Keuntungan dalam kategori ini berasal bukan dari kedekatannya dengan perusahaan lain, tetapi murni dari konsentrasi aktivitas dilokasi tersebut.
- b. Keuntungan eksternal untuk perusahaan tetapi internal untuk sektor, atau disebut juga *localization economies*. Keuntungan ini diperoleh karena didaerah padat penduduk perusahaan – perusahaan beroperasi pada sektor yang sama. Sedangkan skala ekonomis bergantung pada ukuran dari perusahaan atau pabrik – pabrik tersebut, *localization economies* ditentukan oleh ukuran dari sektor diwilayah tersebut, dengan berbagai pilihan terhadap tenaga kerja yang terampil dan *specific managerial* serta keahlian teknis yang tersedia.

Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah atau lokasi tertentu merupakan karakteristik pertama dari sebuah pusat pertumbuhan. Karakteristik selanjutnya dari sebuah pusat pertumbuhan adalah adanya keterkaitan yang erat dari segi input dan output antara sesama kegiatan ekonomi yang terdapat didalamnya, keterkaitan ini sangat penting artinya untuk

dapat menghasilkan keuntungan aglomerasi karena adanya konsentrasi tersebut. Karakteristik terakhir dari sebuah pusat pertumbuhan adalah bahwa didalamnya terdapat sebuah kegiatan sektor industri ekonomi dari industri induk yang dapat berfungsi baik sebagai industri hulu atau industri hilir (Sjafrizal, 2012).

2.5. Spesialisasi Ekonomi Wilayah

Perekonomian suatu wilayah dikatakan terspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan suatu sektor ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kemajuan sektor tersebut. Spesialisasi sektor ekonomi menunjukkan bahwa aktifitas ekonomi pada suatu wilayah dikuasai oleh beberapa industri tertentu. Suatu wilayah dapat diartikan sebagai wilayah yang terspesialisasi apabila dalam sebagian kecil industri pada suatu wilayah tersebut memiliki penghasilan yang besar terhadap keseluruhan industri (Muzamil, 2001).

Pengembangan sektor prioritas tersebut dapat dilakukan melalui investasi dan peningkatan sumber daya manusia pada sektor tersebut. Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut. Beberapa ahli ekonomi mulai memperhitungkan efek spesialisasi terhadap perekonomian suatu wilayah. Menurut Kuncoro (2002), salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi ekonomi di wilayah.

Berbagai macam alat analisis telah dikembangkan untuk melihat tingkat spesialisasi regional. Marquillas dalam Soepono (2002) memodifikasi analisis *shift share* klasik dengan memasukkan efek alokasi untuk melihat spesialisasi suatu sektor dalam suatu wilayah. Selanjutnya Kim dalam Kuncoro (2002) mengembangkan *indeks krugman* untuk melihat spesialisasi regional di Amerika Serikat.

2.6. Aglomerasi

Persebaran sumberdaya yang tidak merata menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Ketidakmerataan sumber daya ini tercermin pada konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tertentu saja. Hubungan positif antara aglomerasi geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin dan Octaviano, 2001). Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai akumulasi modal. Dengan kata lain, daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak mempunyai konsentrasi industri pengolahan.

Penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan pengelompokan

perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi. Aglomerasi merupakan suatu lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukannya akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Skala dan keanekaragaman memainkan peran penting dalam pembentukan dan pertumbuhan aglomerasi. Sedangkan berbagai literatur mengenai kluster industri menegaskan bahwa ciri utama dari suatu kluster adalah spesialisasi sektoral dalam daerah yang berdekatan (Kuncoro, 2002).

Selanjutnya menurut McCann (2006) jenis sumber aglomerasi ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Information Spillovers

Jika banyak perusahaan pada industri yang sejenis beraglomerasi pada lokasi yang sama maka pekerja pada perusahaan tertentu secara relatif mudah berhubung dengan pekerja-pekerja dari perusahaan lokal lain. Dengan demikian, pertukaran informasi baik antar pekerja maupun antar perusahaan akan berlangsung setiap saat.

b. Non-traded local inputs

Pada situasi dimana perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis mengelompok di satu tempat maka ada beberapa input tertentu yang menjadi lebih efisien jika digunakan secara bersama-sama oleh pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut dibandingkan jika input tersebut dibeli secara individu oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

c. *Local skilled-labour pool*

Ketersediaan tenaga kerja terampil diwilayah tersebut akan menyebabkan turunya biaya tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan dilokasi tersebut.

2.6.1 Pengaruh Aglomerasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas yang dihasilkan dari kedekatan geografis dari kegiatan ekonomi, selanjutnya adanya ekonomi aglomerasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sebagai akibatnya daerah-daerah yang termasuk dalam aglomerasi pada umumnya mempunyai laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang bukan aglomerasi.

Hubungan positif antara aglomerasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan (Martin dan Octaviano, 2001). Aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan.

2.6.2 Keuntungan Aglomerasi

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa keuntungan aglomerasi (*Agglomerasi Economies*) pada dasarnya merupakan kekuatan utama dari sebuah pusat pertumbuhan. Alasannya adalah karena dia dapat memberikan keuntungan

eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat tersebut. Karena itu dapat dikatakan bahwa bilamana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan cukup besar, maka pusat tersebut akan sulit berkembang bilaana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan sangat terbatas atau tidak ada sama sekali (Sjafrizal, 2012).

Keuntungan aglomerasi baru dapat dilihat bilamana terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan *input* (*Backward Linkage*) atau keterkaitan dengan *output* (*Forward Linkages*). Dengan adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha, sehingga daya saingnya menjadi semakin meningkat.

Secara lebih rinci, keuntungan aglomerasi tersebut secara makro sebenarnya terdiri dari beberapa unsur didalamnya. Sjafrizal menyatakan bahwa keuntungan aglomerasi tersebut meliputi tiga unsur utama yaitu : (1) Keuntungan Skala Besar (*Larg Scale Economies*), (2) Keuntungan Lokalisasi (*Localization Economies*), (3) Keuntungan Urbanisasi (*Urbanization Economies*) (Sjafrizal, 2012).

1. Keuntungan Skalan Besar

Keuntungan skala besar merupakan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya produksi rata-rata per unit, karena produksi

dilakukan dalam skala besar. Sedangkan produksi dalam skala besar tersebut dimungkinkan bila terdapat jaminan ketersediaan bahan baku dan pasar, karena perusahaan berlokasi dalam suatu pusat pertumbuhan dimana didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lainnya baik dari segi *input* maupun *output*.

2. Keuntungan Lokalisasi

Keuntungan lokalisasi adalah keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut, baik untuk bahan baku dan hasil produksi, yang timbul karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan terkait lainnya dalam sebuah pusat pertumbuhan. Bila kegiatan ekonomi dalam pusat tersebut adalah dalam bentuk industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan yang menggunakan dan menghasilkan barang-barang relatif berat, maka penghematan ongkos angkut tersebut akan diperoleh dalam jumlah yang relatif besar. Keuntungan eksternal ini selanjutnya akan menjadi faktor pendorong pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya tarik yang cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam pusat pertumbuhan tersebut.

2.6.3. Pengukuran Aglomerasi

Pengukuran aglomerasi dapat pula dilakukan secara regional untuk semua sektor ekonomi industri yang berada pada wilayah tertentu. Dalam hal ini, aglomerasi ditentukan berdasarkan konsentrasi beberapa kegiatan industri pada suatu daerah. Sedangkan kekuatan utama yang mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan sektor ekonomi industri tersebut adalah sama yaitu adanya keuntungan

aglomerasi (Glaser, et al, 2000). Pengukuran aglomerasi secara regional dapat dilakukan dengan melihat pada seberapa jauh terjadinya spesialisasi sektor ekonomi.

Selanjutnya dengan mengacu pada beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. Aglomerasi berhubungan dengan konsentrasi serta spesialisasi ekonomi dan beberapa fasilitas pendukung yang melayani industri-industri baik pada kluster maupun kota, dimana keberadaan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya konsentrasi spasial.

2.7. Defenisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan mesyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer kesektor skunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan Nasional/Regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya dibidang ekonomi.

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah disuatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan wilayah tersebut.

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat diartikan pula sebagai suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (rill) disusun berdasarkan harga pada Tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.8. Sektor Ekonomi Wilayah

Sektor ekonomi wilayah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Siak.

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha dan didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari atau memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Usaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2. Pertambangan dan penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

3. Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, petambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakan dengan mesin dan tangan. Termasuk industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan,

kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air untuk tujuan produksi es. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan.

6. Kontruksi

Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha dibidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan

perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur dilokasi proyek dan juga kontruksi yang bersifat sementara.

Kegiatan kontruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan kontruksi untuk pihak lain, maupun oleh kntraktor khusus, yaitu unit uaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal, kontruksi gedung bukan tempat tinggal, kontruksi bangunan sipil, misal : jalan, tol, jembatan terowongan, bendungan, dll.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha dibidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pergangkutan. Kategori transportasi dan pengudangan terdiri atas angkutan rel, angkutan darat, angkutan lautm angkutan sungai, danau dan penyebrangan, angkutan udara, pengudangan dan jasa penunjang

angkutan,, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan, pergudangan dan lain-lain.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan dan minuman bukanya untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

10. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara kuangan, suransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendataan fan lembaga keuangan sejenis.

12. Real Estate

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau peralatan dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga encakup kegiatan pembangunan gedung, peeliharaan atau penyewaan bangunan, teal estat adalah propert berupa tanah dan bangunan.

13. Jasa Perusahaan

Kategori jasa perusahaan merupakan dari 2 (dua) kategori, yaitu kategori M dan kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan ini yang termasuk kategori M antara lain jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, perikanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturanya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

15. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tulisan seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan usia dini.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan social yang cukup luas cakupannya, survei sosial ekonomi nasional (susenas) ; berbagai survei khusus yang dilakukan Direktorat Nerasa

Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS ; Bidang statistik Distribusi BPS Provinsi Riau.

17. Jasa Lainnya

Kegiatan jasa lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa perbaikan komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, ECD, dan lain-lain.

2.9 Kajian Spesialisasi dan Aglomerasi Wilayah Studi lain

2.9.1 Kajian Spesialisasi Wilayah Studi Lain

Studi sebelumnya tentang analisis tingkat spesialisasi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Metode *Location Quotient* yang dilakukan oleh Arief Rahmana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief (2008) di Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa hasil analisis indeks *Location Quotient* terbesar untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan adalah sebesar 1,779 untuk 1 (satu) kecamatan yaitu Cimaragas, tingkat konsentrasinya 1,779 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan output produksi Kabupaten Ciamis. Indeks LQ terbesar untuk sektor pertambangan dan penggalian adalah sebesar 3,7779 untuk Kecamatan Cimaragas, tingkat konsentrasinya 3,779 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan output produksi Kabupaten Ciamis.

Nilai indeks LQ ini menunjukkan seberapa besar tingkat spesialisasi relatif suatu daerah dalam aktivitas sektor perekonomian tertentu, dalam hal ini membandingkan antara kecamatan dan kabupaten se Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lio Andi Prasetya (2011) tentang keunggulan dan spesialisasi ekonomi wilayah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 - 2009 dengan menggunakan pendekatan model *Shift-Share Esteban Marquillas*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lio bahwa menunjukkan Kabupaten Wonosobo tersesialisasi pada sektor pertanian setia Tahun analisis selama periode penelitian. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo lebih memprioritaskan sektor pertanian, selain itu kondisi iklim dan lahan di Kabupaten Wonosobo juga cocok untuk pertanian sehingga sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat besar terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo. Selain sektor pertanian, Kabupaten Wonosobo juga berspesialisasi pada sektor angkutan, sewa dan jasa perusahaan.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Siti Fatimah Nurhayati (2000), tentang analisis penentuan spesialisasi sektor di Kabupaten Boyolali dalam menghadapi implementasi otonomi daerah masa krisis ekonomi 1997 – 1999, dari hasil penelitian tersebut adalah dari angka PDRB atas dasar harga konstan 1995 selama kurun waktu 1997 – 1999 dapat diketahui sektor unggulan di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Dengan ketentuan apabila nilai $LQ > 1$ maka, sektor tersebut dapat dijadikan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Boyolali dan mampu bersaing dengan sektor yang sama di Jawa Tengah. Ada dua sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan jika dilihat dari nilai rata-rata LQ Tahun 1997 – 1999 yaitu sektor eranian dan perdagangan.

Dan dari hasil analisis *shift share* Esteban-Marquillas ditemukan dua sektor memiliki spesialisasi yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, sehingga dari kedua analisis tersebut dengan hasil yang sama bahwasanya kedua sektor tersebut pertanian dan sektor perdagangan layak mendapatkan prioritas dalam pembangunan.

2.9.2 Kajian Aglomerasi Wilayah Studi Lain

Studi sebelumnya tentang analisis konsentrasi spasial dan faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur di kawasan barat Indonesia yang dilakukan oleh Meilani Putri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2013). Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan yaitu, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan distribusi paling tinggi terhadap PDB Indonesia, namun ketimpangan wilayah antar KBI masih relatif sedang. Hal ini terlihat pada hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan bahwa ketimpangan industri pada wilayah KBI periode 2002 sampai Tahun 2011 masih tergolong sedang, yaitu berkisar 0,68 sampai 0,72 dengan tren yang berfluktuasi. Hasil analisis yang menggunakan jumlah tenaga kerja menunjukkan bahwa adanya suatu konsentrasi industri manufaktur pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Sedangkan dengan menggunakan indikator nilai tambah provinsi yang tergolong sangat tinggi adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau. Hasil analisis dengan menggunakan Indeks Hoover Balassa (LQ Tenaga Kerja) menurut provinsi menunjukkan bahwa DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten yang berdaya saing tinggi dan terspesialisasi pada sektor industri manufaktur dengan nilai indeks yang lebih dari satu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2012), penelitian tentang aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi, peran karakteristik regional di Indonesia dengan metode analisis menggunakan Indeks Balassa pembilangan dari indeks ini menyajikan bagian wilayah j dai total tenaga kerja disektor industri manufaktur i . Semakin terpusat suatu industri, semakin besar Indeks Balasannya. Dari hasil analisis bahwasanya selama periode 1994 – 2003 diketahui bahwa variable aglomerasi mempunyai nilai koefesien yang paling tinggi dibandingkan dengan independen yang lain, yaitu laju angkatan kerja, tingkat inflasi, laju *opennes*, dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa aglomerasi (pengelompokan industri) jika lebih dikembangkan lagi bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa laju angkatan kerja, laju inflasi, laju *Openness*, memberikan pengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan variable aglomerasi dan *human capital* tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional (laju PDRB rill).

Selanjutnya berdasarkan penelitian Purwaningsih (2012), dengan judul penelitian tren konsentrasi dan faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri manufaktur besar sedang di Jawa Barat dengan metode analisis *Indeks Williamson, IndeksEntropi Theils, Indeks Hoover Balassa* dan Regresi Data Panel. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pembangunan infrastruktur dan aglomerasi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kurun waktu 2001 – 2008 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat reatif stabil.

Kontribusi sektor yang paling besar di Jawa Barat yaitu industri pengolahan. Hasil perhitungan dengan menggunakan indek williamson menunjukkan pada Tahun 2001-2008 ketimpangan antar Kabupaten/kota di Jawa Barat masih relatif tinggi yaitu berkisar 0,6 sampai 0,69 dan mempunyai tran yang semakin menurun. Hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Theils pada Tahun 2001-2008 ketimpangan antar Kabupaten/kota di Jawa Barat berkisar 0,093 sampai 0,107 dan mempunyai tren yang meningkat. Aglomersi manufaktur masih terkonsentrasi di Kabupaten Bandung sebagai pusat pertumbuhan WKPP IV, Kabupaten Bogor sebagai pusat pertumbuhan WKPP I, Kabupaten Bekasi sebagai pusat pertumbuhan WKPP II dan yang menjadi daerah perluasan aglomerasi yaitu Karawang dan Puwakarta. Dan secara sektoral industri yang secara dominan yaitu industri tekstil.

2.10. Ringkasan Teori

Sintesa teori adalah rangkuman dari teori-teori yan digunakan dalam penelitian, dalam hal ini ringkasan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui konsentasi ekonomi wilayah Kabupaten Siak 2013 -2017 tergambar melalui Tabel 2.1 :

Tabel 2.1.
Ringkasan Teori

No	Teori	Sumber	Keterangan
Pengembangan Wilayah			
1	Defenisi wilayah	UU 26 Tahun 2007	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
		Nurzaman (2012)	wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang. Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk menerangkan ruang yang didefenisikan menurut kreteria tertentu untuk tujuan tertentu.
		Murtry (2000)	wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan satu kesatuan ekonomi, politik, sosial administrasi, iklim, hingga geografi, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian.
		Rustiadi (2007)	Wilayah sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa memperhatikan batas dan kondisinya.
2.	Pengembangan Wilayah (Konsep dan tujuan)	Alkadri (2002)	Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik.
		Sjafrizal (2012)	Tujuan pengembangan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyata, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun pihak swasta.
		Tarigan (2005)	Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
3.	Wilayah Menurut	Nurzaman (2012)	Konsep yang memandang wilayah sebagai cara untuk mengklarifikasi berkembang sesuai

	Pandangan Subjektif		dengan kemajuan ekonomi. Ketika ekonomi masih berupa sistem pertanian yang sederhana, wilayah dipandang sebagai “wilayah formal” yang didefinisikan berdasarkan homogenitas.
Teori Keynes dan Neo-Keynes Dalam Pengembangan Wilayah			
4.	Pengembangan Wilayah	Teori Keynes dan neo-Keynes	Pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa ekonomi tidak akan stabil tanpa campur tangan pemerintah. Yang dimaksud dengan keadaan stabil adalah keadaan dimana tidak terdapat kesenjangan yang sedemikian rupa sehingga mengganggu perkembangan lebih lanjut.
Konsep Pengembangan Dari Atas			
5.	Pengembangan dari atas	Nurzaman (2012)	Konsep pengembangan dari atas merupakan teori yang perkembangan bagi suatu <i>banal space</i> , yaitu ruang yang abstrak, yang menjelaskan atau mendefinisikan suatu objek berdasarkan relasinya. Objek disini lebih bertujuan kepada suatu kegiatan ekonomi wilayah, dan lebih menekankan pada perkembangan ekonomi yang dinamis dipacu oleh inovasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Pengembangan dan Perencanaan Ekonomi			
6.	Pengembangan dan perencanaan Ekonomi	Sjafrizal (2012)	Pengembangan perencanaan ekonomi (<i>economic planning</i>) berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah.
Teori Konsentrasi Ekonomi Wilayah			
7.	Konsentrasi Ekonomi Wilayah	Kuncoro (2002)	Konsentrasi ekonomi wilayah menunjukkan <i>share</i> suatu wilayah dan distribusi lokasi dari suatu sektor ekonomi.
		Krugman (2000)	konsentrasi ekonomi wilayah merupakan aspek yang ditekankan dari aktivitas ekonomi secara geografis dan sangat penting penentuan lokasi industri, Krugman menyatakan bahwa dalam konsentrasi aktivitas ekonomi secara wilayah, ada tiga hal yang terkait yaitu interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan
		Sjafrizal (2012)	Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah atau lokasi

			tertentu merupakan karakteristik pertama dari sebuah pusat pertumbuhan.
		Muzamil (2001)	konsentrasi dapat didefinisikan sebagai bagian wilayah yang menunjukkan distribusi lokasional dari suatu sektor ekonomi. Pada wilayah yang terspsialisasi, konsentrasi menunjukkan tingkatan aktivitas dan distribusi lokasional dari industri pada wilayah tersebut, dimana pada umumnya aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi wilayah inti daripada wilayah sekitarnya.
Teori Spesialisasi Ekonomi			
8.	Spesialisasi Ekonomi Wilayah	Muzamil (2001)	Spesialisasi sektor ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada suatu wilayah dikuasai oleh beberapa industri tertentu. Suatu wilayah dapat diartikan sebagai wilayah yang terspesialisasi apabila dalam sebagian kecil industri pada wilayah tersebut memiliki panghasilan yang besar terhadap keseluruhan industri.
		Soepono, 2002).	erspesialisasi jika suatu wilayah memprioritaskan pengembangan suatu sektor ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kemajuan sektor tersebut.
		Menurut Kuncoro (2002)	Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dikatakan, jika suatu wilayah memiliki spesialisasi pada sektor tertentu maka wilayah tersebut akan memiliki keunggulan kompetatif dari spesialisasi sektor tersebut
			Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah adalah melalui proses pertukaran komoditas antar daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penciptaan spesialisasi ekonomi diwilayah.
Aglomerasi Ekonomi			
9.	Aglomerasi	Kuncoro (2002).	Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (<i>economies of proximity</i>) yang disosialisasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

10.	Aglomerasi Ekonomi	Bradley dan Gans (2000)	Ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas yang dihasilkan dari kedekatan geografis dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya adanya ekonomi aglomerasi dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
		Martin dan Octaviano (2001).	Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan.
11.	Keuntungan Aglomerasi ekonomi	Sjafrizal (2012)	Keuntungan aglomerasi baru dapat dilihat bilamana terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan <i>input</i> (<i>Baskward Linkage</i>) atau keterkaitan dengan <i>output</i> (<i>Forward Linkages</i>).
Pendapatan Regional/Nilai Tambah			
12.	Definisi	Robinson Tarigan (2007)	Produk Doestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian diwilayah tersebut.
		PDRB Siak	Nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2017

2.11. Sintesa Variabel dan Indikator Berdasarkan Kajian Pustaka

Beberapa kajian dalam penelitian yang berkaitan mengenai Kajian Konsentrasi ekonomi yang menggunakan variable dalam penelitian Spesialisasi ekonomi dan Aglomerasi dengan beberapa indikator penelitian serta metode analisis yang berbeda. Adapaun sintesa dan indikator berdasarkan kajian pustaka terdapat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Variable dan Indikator Berdasarkan Kajian Pustaka

No	Pembahasan	Variable	Indikator	Metode Analisis	Hasil
1.	Menganalisis tingkat spesialisasi sektor ekonomi	Spesialisasi	a. Jumlah Penduduk b. Tenaga Kerja c. Investasi d. Nilai Produksi e. Laju Pertumbuhan f. Kesempatan Kerja Di sektor	Analisis Indeks Spesialisasi Ekonomi. (SI)	Teridentifikasi dan diketahui tingkat spesialisasi sektor ekonomi di Kabupaten Siak.
2.	Menganalisis indeks tingkat aglomerasi sektor ekonomi	Aglomerasi	a. Angkatan Kerja b. Inflasi c. Industri Manufaktur d. Keterbukaan ekonomi e. Human Kapital f. Laju Pertumbuhan PDRB	Analisis Indeks Tingkat Aglomerasi dengan Metode Indeks <i>Hirschman Herfdhal</i> (HHI).	Teridentifikasi dan diketahui indeks tingkat aglomerasi sektor ekonomi di Kabupaten Siak apakah sudah teraglomerasi atau belum teraglomerasi.
3.	Menganalisis tipologi konsentrasi	Tipologi konsentrasi	a. Indeks Aglomerasi b. Indeks Spesialisasi	Analisis karakteristik tipologi konsentrasi	Teridentifikasinya karakteristik tipologi konsentrasi ekonomi,

No	Pembahasan	Variable	Indikator	Metode Analisis	Hasil
	sektor ekonomi	ekonomi	c. Indeks <i>Hoover</i> d. Indeks <i>Theil</i>	ekonomi dengan menggunakan karakteristik Indeks <i>hirschman Herfdhal</i> (HHI)	berdasarkan nilai Indeks <i>Hirschman Harfdhal</i> (HHI)
4.	Merumuskan strategi pengembangan konsentrasi sektor ekonomi	Internal dan Eksternal	a. Hasil analisis Indeks Spesialisasi (IS) b. Hasil analisis Indeks Hirschman Herfdhal (HHI) c. Hasil analisis tipologi konsentrasi sektor ekonomi	Metode analisis SWOT.	Strategi dan kebijakan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Siak.

Sumber : Hasil Analisis, 2017.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau